**Pendapat**

Wamil merupakan kebijakan yang inkonstitusional dan dapat melanggar hak asasi manusia. Selain itu, wamil juga tidak relevan dengan kondisi keamanan Indonesia saat ini.Wamil merupakan kebijakan yang inkonstitusional. Wamil bertentangan dengan Pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal ini memberikan kebebasan kepada warga negara untuk memilih cara mereka dalam membela negara, termasuk melalui wamil atau tidak.Wamil tidak relevan dengan kondisi keamanan Indonesia saat ini. Indonesia saat ini tidak menghadapi ancaman militer yang serius. Oleh karena itu, wamil tidak diperlukan untuk memperkuat pertahanan negara.

ada beberapa alternatif pengganti bela negara yang dapat dipertimbangkan

* Pembekalan kesadaran bernegara melalui pendidikan formal dan nonformal Pendidikan formal dapat memberikan pelajaran tentang bela negara melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Pendidikan nonformal dapat dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler, seperti pramuka, paskibra, dan bela diri.
* Pembekalan keterampilan dan kedisiplinan melalui program-program pemerintah, seperti program magang, pelatihan kerja, dan kegiatan sosial.

**Beberapa manfaat tidak diadakannya wajib militer**

* Mengurangi biaya negara. Wamil membutuhkan anggaran yang besar untuk pelaksanaannya. Dengan tidak mengadakan wamil, pemerintah dapat menghemat anggaran negara yang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
* Mencegah pelanggaran hak asasi manusia. Wamil dapat melanggar hak asasi manusia, seperti hak atas kebebasan dan hak atas integritas pribadi. Dengan tidak mengadakan wamil, pemerintah dapat menghormati hak asasi manusia warganya.
* Mencegah konflik sosial. Wamil dapat menimbulkan konflik sosial antara warga negara yang mengikuti wamil dan yang tidak mengikuti wamil. Dengan tidak mengadakan wamil, pemerintah dapat menjaga kondusifitas sosial di masyarakat.

**Pendapat mengenai Membayar pajak dapat digolongkan sebagai bentuk bela negara non fisik**

Membayar pajak dapat digolongkan sebagai bentuk bela negara non fisik. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu, dengan membayar pajak, warga negara telah berkontribusi dalam menjaga kedaulatan negara.